

**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

TAHUN ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat petunjuk dan hidayah-Nya jualah sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar berperan penting dalam meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Pengendalian kualitas penduduk untuk menjamin tercapainya penduduk tumbuh seimbang antara lain diupayakan melalui Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk tersebut terus dipertahankan sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan maka untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas. Berkaitan dengan keberhasilan dari kebijakan pemerintah yang menerapkan Program KB dengan tujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

Walaupun demikian, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tetap ada, seperti masih kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan serta belum meratanya LDP (Local Development Plan) di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil pendataan penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 sebanyak 143.096 jiwa dengan jumlah 37.242 Kepala Rumah Tangga. Oleh karena itu dalam program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 melalui RPJMD program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana masih menjadi program prioritas untuk mengatasi masalah pengendalian penduduk dan pelebagaan keluarga kecil yang berkualitas.

Dengan berakhirnya pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025, maka perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana upaya dan hasil pencapaian pelaksanaan program yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025 dengan sasaran – sasaran kinerja dalam RKP bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar.

Semoga laporan ini dapat memberikan motivasi bagi seluruh aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sesuai tugas pokok dan fungsi guna upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, Amin.

Benteng, 24 Februari 2026

KEPALA DINAS,



Ir. H. M. YUNAN KRG TOMPO BULU, S.T., M.T., IPM.
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196805211996031009

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB. I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Gambaran Umum DP3AP2KB 3

1.3. Stuktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 5

1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualisasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional 8

1.5. Inovasi 16

1.6. Penghargaan 16

BAB. II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERITAHAN 17

2.1 Capaian Kinerja IKK Urusan Pemerintahan 17

BAB. III PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang kemudian Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Gubernur, sehingga dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB.

Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Ukuran keberhasilan kinerja dilihat dari sejauh mana sasaran-sasaran tersebut tercapai. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut yang dituangkan ke dalam suatu laporan yang disebut Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Penyusunan LPPD bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan kinerjanya dan mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja Tahun 2026 dan Penetapan Kinerja Tahun 2026. Laporan Kinerja ini juga dapat dijadikan sebagai feedback yang berharga dalam memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.2. Gambaran Umum DP3AP2KB

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memiliki tugas dan fungsi membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam Peraturan Daerah ini urusan Keluarga Berencana diintegrasikan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dalam satu lembaga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Tipe A dan terletak di Jl. S. Siswomiharjo No. 9 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar Email : bppkbkep.selayar@gmail.com , Tlp. (0414) 21195, dengan Titik Koordinat -6.11853, 120.46408. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai dinas yang melaksanakan kewenangan di bidangnya, diharapkan nantinya dapat mendampingi masyarakat terutama kelompok-kelompok perempuan untuk dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar melalui pelayanan dengan program-program khusus yang dimilikinya.

Pengelolaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat diharapkan mampu menunjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menjadi Daerah Kabupaten Kepulauan yang maju dan sejahtera dengan penduduk yang memiliki kualitas yang dapat diandalkan untuk pengelolaan sumber daya yang ada. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang terstruktur dan terintegrasi dengan kegiatan

pembangunan melalui perencanaan yang strategis untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi setiap saat agar tujuan dan sasaran program yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



1.3. STUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

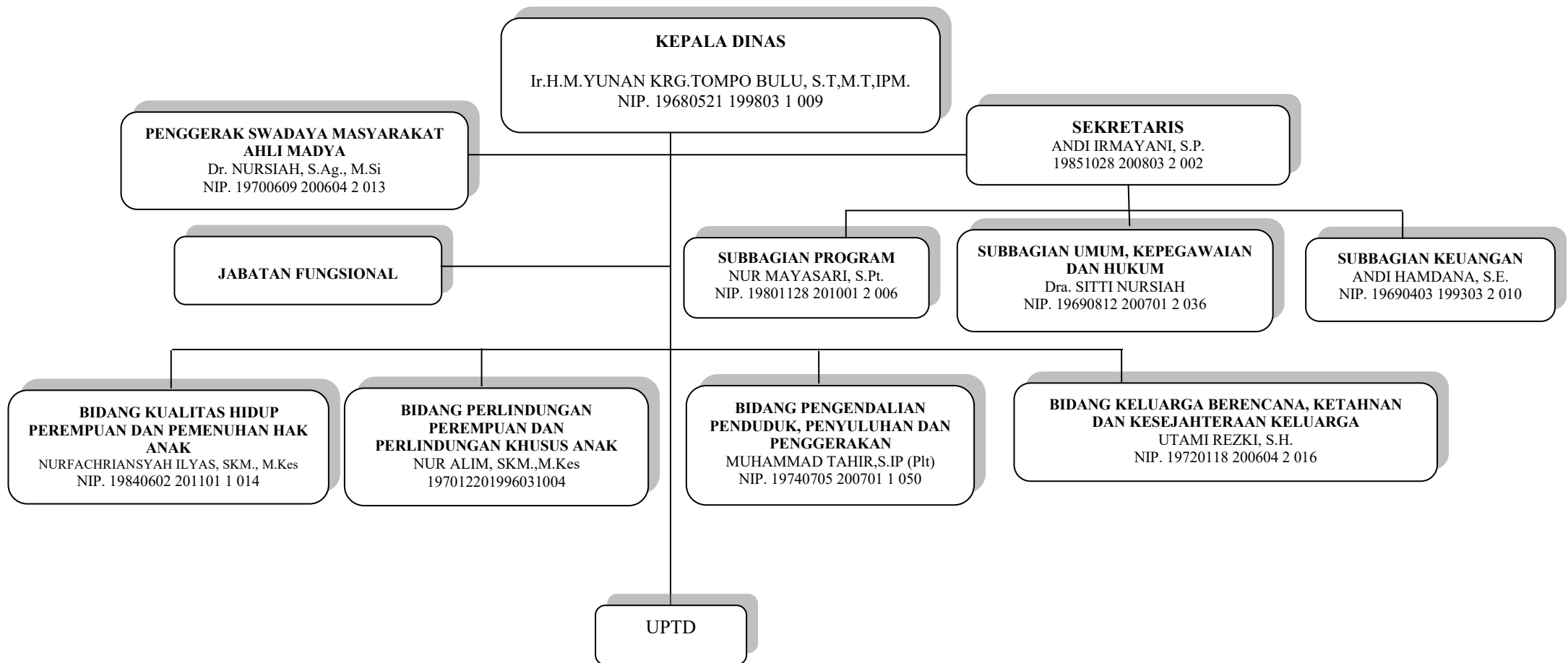
1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub. Bagian Program
 2. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 3. Sub. Bagian Keuangan.
- III. Bidang Peningkatan Kualitas Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
- IV. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
- V. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
- VI. Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- VII. UPTD
- VIII. Jabatan Fungsional;

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan koordinasi terhadap kelancaran kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, kesekretariatan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional.

1. Jumlah Aparatur Sipil Negara

Tabel. 1. Jumlah Aparatur Sipil Negara

No.	Nama	Jabatan	KET.
1	Ir. H. M. YUNAN KRG TOMPOBULU, S.T.,M.T.,IPM Nip. 19680521 199803 1 009	Kepala Dinas DP3AP2KB	
2	Ir. ANDI IRMAYANI, S.P.,M.M Nip. 19851028 200803 2 002	Sekretaris Dinas DP3AP2KB	
3	MUHAMMAD TAHIR, S.IP Nip. 19740705 200701 2 050	Plt. Kepala Bidang Dalduk, Penyuluhan dan Penggerakan	
4	UTAMI REZKI, SH Nip. 19720118 2000604 2 016	Kabid. KB, Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga	
5	NUR ALIM, SKM.,M.Kes Nip. 19701220 199603 1 004	Kabid. Perlindungan Perempuan & Perlindungan Khusus Anak	
6	NURFACHRIANSYAH ILYAS, SKM.,M.Kes Nip. 19840602 201101 1 014	Kabid. Kualitas Hidup Perempuan & Pemenuhan Hak Anak	
7	Dra. SITTI NURSIHAH Nip. 19690812 200701 2 036	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum	
8	NUR MAYASARI, S.Pt Nip. 19801128 201001 2 006	Kepala Sub. Bagian Program	
9	ANDI HAMDANA, SE Nip. 19690403 199303 2 010	Kepala Sub. Bagian Keuangan	
10	MUHAMMAD IRVAN, S.T Nip. 19820805 201101 1 012	Kepala UPTD Pelayanan Kependudukan dan Wilayah VII)	
11	RUDI AMAL, S.Sos Nip. 19700301 201001 1 007	Kepala UPTD Pelayanan Kependudukan dan Wilayah I)	
12	YUSRIADI, SE Nip. 19801106 201001 1 003	Kasubag. TU UPTD Pelayanan Kependudukan dan KB Wilayah VII	
13	ANDI BAU OPU, S.M. Nip. 19721226 200701 2 012	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
14	RISNAWATI DP,S.IP Nip. 19840511 201407 2 003	Penelaah Teknis Kebijakan	
15	MASLINDA, SE Nip. 19760116 200701 2 017	Kasubag. TU UPTD Pelayanan Kependudukan dan KB Wilayah II	
16	HUSNI LAEGO, S.Sos Nip. 19880122 202203 2 002	Penelaah Teknis Kebijakan	

17	SILVY SUTRI INSANI ASIS, S.Sos Nip. 19970307 202203 2 009	Penelaah Teknis Kebijakan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
18	NURSYAMSI, S.Sos Nip. 19980411 202203 2 011	Analisis Perlindungan Perempuan	
19	HARTATI Nip. 19690204 200906 2 001	Pengadministrasi Keuangan	
20	SYAMSIRAWATI Nip. 19830710 200903 2 003	Pengadministrasi Kepegawaian	
21	Hj. NURNIATI. A Nip. 19700425 199003 2 006	Pengadministrasi Umum	
22	SITTI NURAENI Nip. 19680303 199103 2 019	Pengadministrasi Umum	
23	MUHAMMAD KASIM, A.Md Nip. 19780328 201212 1 001	Pengelola Data dan Informasi UPTD Pelayanan Kependudukan dan KB Wilayah V	
24	KAMIRUDDIN Nip. 19770815 200906 1 001	Pengelola Kepegawaian	
25	GAZALI Nip. 19730608 200906 1 001	Pengadministrasi Kepegawaian	
26	SUHARMIYANI, S.STP Nip. 19911107 201206 2 001	Fungsional Analisis Kebijakan	
27	Dr. NURSIAH, S.Ag., M.Si Nip. 19700609 200604 2 013	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	
28	IRNAWATI, S.Pi Nip. 19831019 201101 2 012	Fungsional Analisis Kebijakan	
29	ANDI OPU, SE Nip. 19740104 200701 2 015	Fungsional Penata Kependudukan & KB Muda	
30	MULIATI, SE Nip. 199208182025052001	Perencana Ahli Pertama	
31	CITRA DEWI, S.Sos Nip. 200202042025052002	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
32	IRMAWATI, S.Sos Nip. 200207282025052002	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
33	ANDI SOFIYANTI, S.Ag Nip. 19770308 201101 2 008	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Benteng	Pegawai Pusat
34	DARMAWATI, SH Nip. 19730314 201407 2 003	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontoharu	Pegawai Pusat
35	NURNIAH. M, AMKL Nip. 19730405 200604 2 024	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Pasimasunggu	Pegawai Pusat
36	ROSDIANA, S.Ag Nip. 19730117 201101 2 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec.	Pegawai Pusat

		Bontomate'ne	
37	SUWARSI NOVIANTI, SE Nip. 19800307 201407 2 003	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontoharu	Pegawai Pusat
38	AMBO RAPPE. M Nip. 19760912 201001 1 012	Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kec. Pastim	Pegawai Pusat
39	ANDI TAWAKKAL Nip. 19820621 201410 1 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne	Pegawai Pusat
40	ASMARANI Nip. 19721219 201407 2 003	Penyuluh Keluarga Berencana Kec, Bontomanai	Pegawai Pusat
41	BAHYANI Nip. 19700109 201212 2 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne	Pegawai Pusat
42	MULIATI, SE Nip. 19920818 202505 2 001	Perencana Ahli Pertama	Pegawai Pusat
43	MUHAMMAD ANSAR Nip. 19740702 201407 1 003	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Benteng	
44	NASMAWATI Nip. 19701008 201407 2 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Pasimasunggu	Pegawai Pusat
45	RAHMIATI Nip. 19820329 200801 2 021	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Benteng	Pegawai Pusat
46	SUPARMAN, SP Nip. 19800130 201502 1 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontosikuyu	Pegawai Pusat
47	SURYANI Nip. 19680513 201410 2 002	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne	Pegawai Pusat
48	JUMRAWATI, S.Sos Nip. 197205172022212001	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
49	SABDA ALAM, SKM Nip. 199104202022211002	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
50	MUSLIADI, S.E Nip. 199102242022211003	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
51	ANDI TAZKIR SAIFUL, S.Pd Nip. 198207012022211001	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
52	SULASTRI, S.IP Nip. 199103312022212001	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
53	ANDI ULFAWATI REZKI, A.Md.Keb Nip. 199201032022212008	PKB Terampil	P3K BKKBN Provinsi

54	WIWI APRIANI, A.Md.Keb. Nip. 199404102022212005	PKB Terampil	P3K BKKBN Provinsi
55	ANDI GUNAWAN, ST Nip. 198707312023211018	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
56	NURJAYANI, S.Pd.I Nip. 19740624 202321 2 008	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
57	NUR MAYA Nip. 199712052024212009	Petugas Lapangan KB Pemula	P3K BKKBN Provinsi
58	SYAMSUL BAHRI, S.IP Nip. 199312292023211020	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
59	ERMI SAHARA Nip. 19771026 2024212002	Petugas Lapangan KB Pemula	P3K BKKBN Provinsi
60	AKMAL, S.Sos Nip. 198009092023211010	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
61	ILHAM, S.Sos Nip. 198110022023211008	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
62	MARWANTI, S.Pd Nip. 199509162023212045	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
63	ISMAIL, S.P Nip. 198503082023211016	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
64	ISNAWATI Nip. 197003082024212001	Petugas Lapangan KB Pemula	P3K BKKBN Provinsi
65	SELVA ATRIANI KALSUM SUDMAYADI Nip. 199009192024212005	Petugas Lapangan KB Pemula	P3K BKKBN Provinsi
66	NIRMAWATI Nip. 198407092024212002	Petugas Lapangan KB Pemula	P3K BKKBN Provinsi
67	TALLASIANG Nip. 197706252024212001	Petugas Lapangan KB Pemula	P3K BKKBN Provinsi
68	SITTI HUBAYA Nip. 198301302024212001	Petugas Lapangan KB Pemula	P3K BKKBN Provinsi
69	NURHAERANI Nip. 197911192024212014	Petugas Lapangan KB Pemula	P3K BKKBN Provinsi

70	BURHANUDDIN, SE Nip. 197701092024211005	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
71	MULKIYAH SYAHMI, S.Tr.Keb Nip. 199209082023212045	PKB Ahli Pertama	P3K BKKBN Provinsi
72	ISRAWATI IDRIS, SP NI P3K PW. 198510212025212065	Penata Layanan Operasional	P3K PW
73	ITA SAHARA, SE NI P3K PW. 199001212025212067	Penata Layanan Operasional	P3K PW
74	JUMRIATI, SE NI P3K PW. 198304232025212039	Penata Layanan Operasional	P3K PW
75	FAJRIANI, SE NI P3K PW. 199109032025212102	Penata Layanan Operasional	P3K PW
76	NUR NENENG SAFITRI, S.Pd NI P3K PW. 199108162025212075	Penata Layanan Operasional	P3K PW
77	NELLY HAMDANA, S.Sos NI P3K PW. 198806202025212081	Penata Layanan Operasional	P3K PW
78	SITTI AISAH NI P3K PW. 197705052025212038	Operator Layanan Operasional	P3K PW
79	KASMIATI, S.A.P NI P3K PW. 199011062025212116	Penata Layanan Operasional	P3K PW
80	RIDAWATI, A.Md NI P3K PW. 198109292025212029	Pengelola Layanan Operasional	P3K PW
81	MUHAMMAD IKBAL, S.Pd NI P3K PW. 198707132025211135	Penata Layanan Operasional	P3K PW
82	FITRIANI NI P3K PW. 198008122025212073	Operator Layanan Operasional	P3K PW
83	RESTIA YULIANA, S.A.P NI P3K PW. 199810012025212047	Penata Layanan Operasional	P3K PW
84	SRI WAHYUNI. S NI P3K PW. 199806012025212060	Operator Layanan Operasional	P3K PW
85	HIJRANA. R,S.Pd NI P3K PW. 197910242025212019	Penata Layanan Operasional	P3K PW
86	BASNIA, S.A.P NI P3K PW. 199811232025212061	Penata Layanan Operasional	P3K PW
87	DESY SELFIANI, SKM NI P3K PW. 199512042025212118	Penata Layanan Operasional	P3K PW
88	RISKA ASTRIWANA KARIM NI P3K PW. 200111302025212026	Operator Layanan Operasional	P3K PW
89	DESI YULIANA PUTRI NI P3K PW. 199906092025212085	Operator Layanan Operasional	P3K PW
90	SATRIANI, S.Pd NI P3K PW. 198312092025212052	Penata Layanan Operasional	P3K PW
91	NUR INSANA, S.Kep. NS NI P3K PW. 199201072025212133	Penata Layanan Operasional	P3K PW
92	RAHMATIAH	Operator Layanan	P3K PW

	NI P3K PW. 197410242025212018	Operasional	
93	ANUGRAH PUTRA, S.Kom NI P3K PW. 199212202025212242	Penata Layanan Operasional	P3K PW
94	CITRAWATI NI P3K PW. 198510072025212079	Operator Layanan Operasional	P3K PW
95	DARMAWATI NI P3K PW. 197606102025212037	Operator Layanan Operasional	P3K PW
96	ROSNANI NINGSI NI P3K PW. 107804152025212036	Operator Layanan Operasional	P3K PW
97	NIRWANA NI P3K PW. 199804142025212084	Operator Layanan Operasional	P3K PW
98	NUR ABIDIN JAMAL NI P3K PW. 108610132025211075	Operator Layanan Operasional	P3K PW
99	NURMUFIDAH NI P3K PW. 198207122025212080	Operator Layanan Operasional	P3K PW
100	ANDI JUMRIATI NI P3K PW. 196802072025212005	Operator Layanan Operasional	P3K PW
101	ANDI ZULFIANA NI P3K PW. 198112112025212032	Operator Layanan Operasional	P3K PW
102	NOFALIA NI P3K PW. 198906052025212105	Operator Layanan Operasional	P3K PW
103	BAU NARRU NI P3K PW. 197401122025212027	Operator Layanan Operasional	P3K PW
104	NASRULLAH NI P3K PW. 198904222025211087	Operator Layanan Operasional	P3K PW
105	PEDI KRISTAL FIKRAM NI P3K PW. 199105272025211079	Operator Layanan Operasional	P3K PW
106	ILYA RAHAYU NI P3K PW. 200205172025212022	Operator Layanan Operasional	P3K PW
107	MULIATI NI P3K PW. 197606212025212016	Operator Layanan Operasional	P3K PW
108	MUSDALIFAH NI P3K PW. 198411252025212051	Operator Layanan Operasional	P3K PW
109	NUR INTANG NI P3K PW. 197406152025212026	Operator Layanan Operasional	P3K PW
110	ROSMALINA NI P3K PW. 197902282025212034	Operator Layanan Operasional	P3K PW
111	SUTARTINA NI P3K PW. 197208072025212011	Operator Layanan Operasional	P3K PW

Tabel. 2. Data Kualifikasi Pendidikan

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	S3	1
2	S2	3
3	S1	20
4	D III	2
5	SMA	6

Tabel. 3. Pangkat dan Golongan

No	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk. 1 (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	2
4	Penata Tk. 1 (III/d)	11
5	Penata (III/c)	3
6	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	2
7	Penata Muda (III/a)	9
8	Pengatur Tk. 1 (II/d)	2
9	Pengatur (II/c)	1
10	Pengatur (II/b)	0
11	Pengatur Muda (II/a)	0
Jumlah		32

Tabel. 4. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jabatan	Struktural	Fungsional	Ket.
Eselon II/a	0 orang		
Eselon II/B	1 orang		
Eselon III/A	1 orang		
Eselon III/B	3 orang		
Eselon IV/A	7 orang		
Eselon IV/B	2 orang		

Fungsional	5 Orang	14 Orang PNS Pegawai Pusat	Penyuluh Keluarga Berencana (KB)
		24 Orang P3K Pegawai Pusat	Penyuluh Keluarga Berencana (KB)
Pelaksana	13 orang		
Jumlah	32	38	

1.5. INOVASI

NO	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
	-	-	-	-

1.6. PRESTASI/ PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KABUPATEN LAYAK ANAK (PREDIKAT MADYA) TAHUN 2023		√			KEMENTERIAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
2.	KABUPATEN LAYAK ANAK (PREDIKAT MADYA) TAHUN 2024		√			KEMENTERIAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Capaian Kinerja IKK Urusan Pemerintahan Tahun 2025

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
		2.b.1	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Komprehensif	$\frac{\text{Jumlah Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (Penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$	$\frac{15}{15} \times 100\%$ 15	100	Bid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
		2.b.2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan Layanan Komprehensif	$\frac{\text{Jumlah Perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan orang yang mendapatkan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah Perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang}} \times 100\%$	$\frac{4}{4} \times 100\%$ 4	100	Bid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
		2.h.1	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) Per Wanita Usia Subur Usia 15-49 Tahun	$\frac{\text{Total Fertility Rate/TFR Kab/Kota}}{\text{Target Fertility Rate/TFR Kab/Kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap Kab/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{1,7}{2,05} \times 100\%$ 2,05	82,92	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan
		2.h.2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)</i>	$\frac{\text{Total peserta KB Aktif Modern}}{\text{Total Pasangan Usia Subur Usia 15-49 Tahun}} \times 100\%$	$\frac{11.233}{17.415} \times 100\%$ 17.415	64,50	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2.h.3	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	<p><i>Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kab/kota</i></p> $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ <p><i>Target persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kab/kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk provinsi yang bersangkutan</i></p>	$\frac{8}{12,30} \times 100\%$	65,04	<i>Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan</i>	PUS bukan Peserta KB

BAB III

PENUTUP

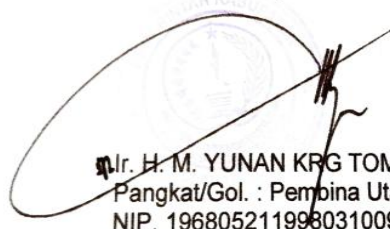
Dalam upaya peningkatan akses pelayanan Keluarga Berencana dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui penguatan peran perempuan di berbagai sektor pembangunan, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta pemberdayaan perempuan. Selain itu, upaya perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak senantiasa menjadi perhatian utama, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan, penguatan kelembagaan layanan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pemenuhan hak-hak perempuan secara berkelanjutan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta Pembangunan daerah ke depan. Kami menyadari dalam penyusunan LPPD ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan, baik dari sisi data maupun penyajian informasi. Oleh karena itu, saran dan masukan yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyusunan laporan ini. Semoga LPPD ini dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan guna mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, akuntabel, serta berkeadilan gender dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Benteng, 24 Februari 2026

KEPALA DINAS,



Ir. H. M. YUNAN KRIG TOMPO BULU, S.T., M.T., IPM.
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196805211996031009